

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari pengelolaan sumber daya oleh masing-masing daerah (Hehanussa, 2015). Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Artini & Putra, 2020). Pertanggung jawaban yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya untuk melakukan pengelolaan suatu keuangan secara terbuka kepada masyarakat secara luas guna untuk menjalankan amanah rakyat terkait pengelolaan keuangan daerah (Mulyanto, et al., 2020).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang harus dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah di periode berikutnya. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan

dengan penyajian laporan keuangan yang memuat seluruh transaksi keuangan pemerintah secara transparan (Artini & Putra, 2020). Penyajian laporan keuangan daerah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas jika pemerintah melakukan aksesibilitas laporan keuangan daerah dan memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah sehingga meminimalkan kegiatan praktik penyelewengan dana yang tidak semestinya dilakukan (Fauziah & Handayani, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya akan mengakibatkan terjadinya penyelewengan anggaran. Penyelewengan anggaran dapat dilihat pada kasus di Kabupaten Ponorogo yang terjadi penggelapan uang dalam bentuk pengadaan alat peraga tahun 2012 senilai Rp 6 miliar untuk 121 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan tahun 2013 senilai Rp 2,1 miliar untuk 43 Sekolah Dasar Negeri (SDN) se-Kabupaten Ponorogo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) (<http://surabaya.tribunnews.com>, di akses pada 08 Agustus 2022). Selain itu, kasus penyelewengan anggaran juga terjadi dalam proyek pembuatan jalan yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar pada tahun 2017. Kasus korupsi pembuatan jalan dalam audit yang dilakukan oleh BPK, ditemukan selisih sebesar Rp 438 juta, kemudian dilanjutkan penyelidikan dan penyidikan oleh Polres tahun 2019, hasilnya kerugian negara Rp 940 juta ([www.detik.com](http://www.detik.com) diakses pada 08 September 2022). Selain itu, terdapat juga kasus ASN Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merugikan negara hingga

Rp 4,3 miliar pada pengadaan Alsintan sebanyak 210 unit tahun anggaran 2018-2019. Ratusan alsintan tersebut merupakan hibah dari APBN dan APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 (www.regional.kompas.com diakses pada 08 September 2022).

Kasus penyelewengan anggaran yang telah diuraikan diatas, memberikan gambaran jika kualitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo masih sangat rendah. Kualitas dan penyajian laporan keuangan belum memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan berupa relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Aksesibilitas laporan keuangan Kabupaten Ponorogo belum memenuhi unsur pertanggungjawaban, penyajian, dan pengungkapan segala aktivitas yang dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat luas. Fenomena tersebut dapat menggambarkan jika masih terdapat kendala dalam segi kualitas, penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan, sehingga perlu dianalisis lebih jauh mengenai tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kualitas laporan keuangan daerah (Husna, *et al.*, 2022). Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan (Husna, *et*

*al.*, 2022). Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi (Husna, *et al.*, 2022). Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dapat dipahami oleh pemakai informasi apabila memenuhi ciri-ciri yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Moha, *et al.*, 2017).

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan daerah (Mulyanto, *et al.*, 2020). Penyajian informasi keuangan pemerintah sesuai dengan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan yaitu para pengguna dan pemeriksa laporan keuangan pemerintah terkait biaya yang telah dikeluarkan. Penyajian laporan keuangan harus mengacu pada prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri, sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Dewi & Mildawati, 2018).

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah aksesibilitas laporan keuangan daerah (Mulyanto, *et al.*, 2020). Aksesibilitas laporan keuangan adalah akses yang diberikan kepada seseorang atau pihak terkait yang memerlukan informasi mengenai laporan keuangan daerah agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi keuangan bisa langsung di akses dari *website* (internet) oleh pengguna laporan keuangan. Akses informasi bisa diketahui dari media cetak dan media elektronik. Pemerintah bertanggungjawab dalam meningkatkan kemudahan akses informasi kepada masyarakat supaya secara langsung dapat mendorong akuntabilitaserdahulu terkait dengan publik (Artini & Putra, 2020).

Penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan tersebut dilakukan oleh Fikrian, (2017). Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa kualitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Rosalia & Rahayu, (2020), menghasilkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Rosalia & Rahayu, (2020), menghasilkan temuan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Sari, (2017), menghasilkan temuan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan masih terdapat *gap research* akibat perbedaan variabel, waktu, dan objek penelitian. Sehingga menjadi sangat penting dilakukan

penelitian terkait dengan kualitas laporan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fikrian (2017) yang meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian yang digunakan yaitu di SKPD Kota Pekanbaru dan pada penelitian ini focus obyek pada SKPD Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan pada definisi dan beberapa penelitian terdahulu, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo?

2. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah kualitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan, penyajian

laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Ponorogo.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang kualitas pelaporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah Kabupaten Ponorogo dan untuk mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari selama kuliah dalam permasalahan yang nyata dimasyarakat.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang kualitas pelaporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah.

